

# KEGIATAN ANALIS KETAHANAN PANGAN BIDANG CADANGAN PANGAN



Oleh:  
**Dr. Ardi Jayawinata, MA.Sc**  
**Kepala Bidang Cadangan Pangan**

# Outline

1. Pendahuluan
2. Kegiatan Cadangan Pangan Masyarakat
3. Kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah

# Landasan Hukum

## Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan

### Pasal 23

(1) Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional.

(2) Cadangan Pangan Nasional terdiri atas:

- a. Cadangan Pangan Pemerintah;
- b. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- c. Cadangan Pangan Masyarakat.

### Pasal 24

Pengembangan cadangan pangan nasional dimaksudkan untuk mengantisipasi **kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat**

# **BAGAN CADANGAN PANGAN NASIONAL**

**(Berdasar UU 18/2012 Tentang Pangan Pada Pasal 23 dan 27 )**

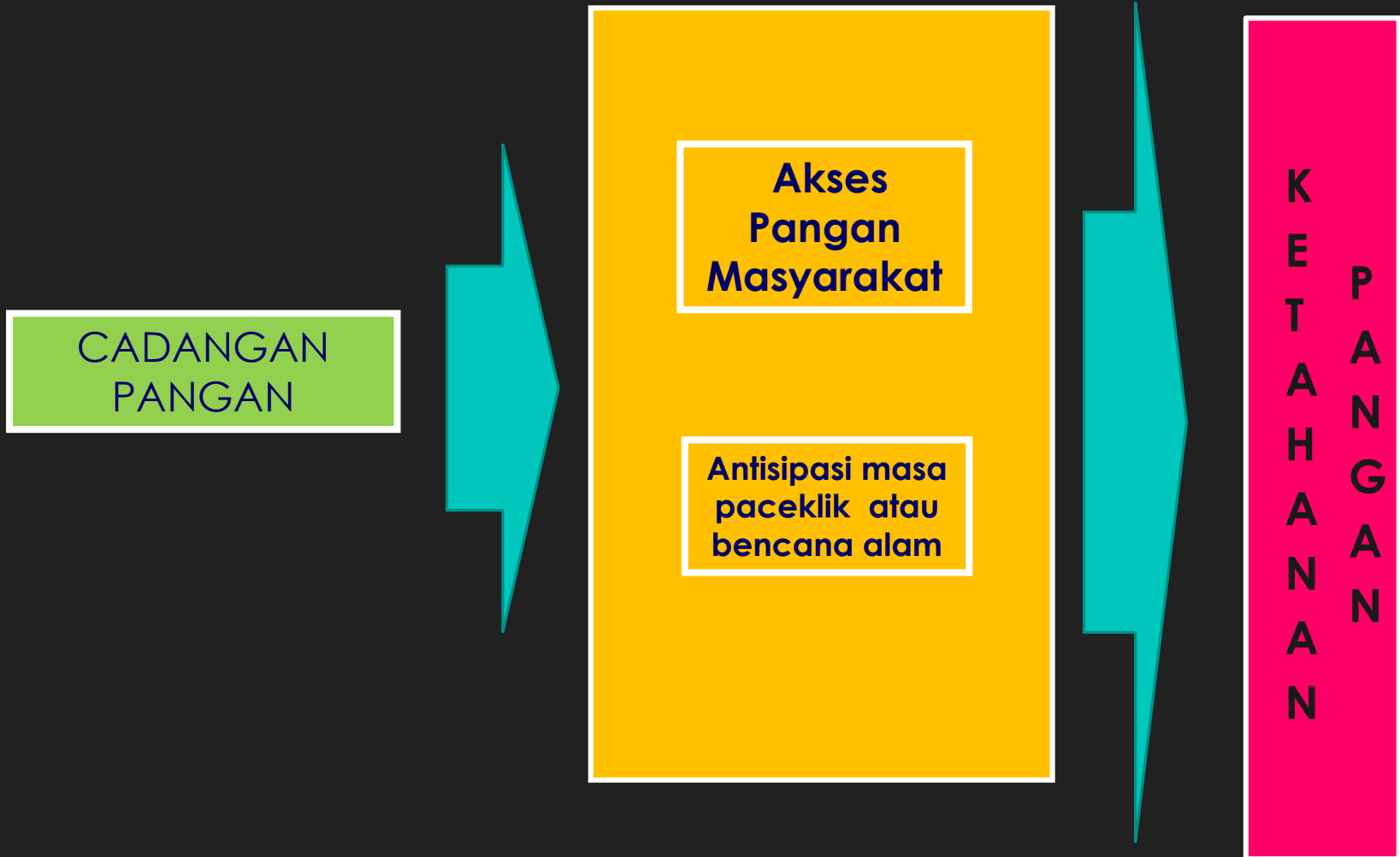


# PENGERTIAN CADANGAN PANGAN

(Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan)

- Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah NKRI untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat
- Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah **persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi**
- Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah **persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.**
- Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah **persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.**
- Cadangan Pangan Masyarakat adalah **persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga**

# PERAN PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN



# Memahami Pentingnya Cadangan Pangan

## PERMINTAAN (supply)

1. Jumlah penduduk yang terus semakin besar.
2. Dinamika penduduk: laju pertumbuhan, struktur piramida, urbanisasi.
3. Ketergantungan terhadap beras masih cukup tinggi.
4. Proporsi penduduk miskin masih besar (11.4%) (Susenas 2013)
5. Berdasarkan Data Statistik Ketahanan Pangan Tahun 2014, prosentase jumlah penduduk sangat rawan pangan (< 70 % AKG 17,04% data triwulan I thn. 2014) dan rawan pangan (70%-89,9% AKG 33,74% data triwulan I thn. 2014)

## PENAWARAN (demand)

1. Tingginya konversi lahan pertanian ke non pertanian
2. Infrastruktur pertanian kurang memadai
3. Dampak perubahan iklim
4. Sebaran produksi pangan tidak merata
5. Rendahnya akses terhadap sumber pembiayaan, teknologi, informasi, dan pasar
6. Semakin terintegrasinya pasar pangan domestik dan internasional.

# KEGIATAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT





## Pasal 33

### Ayat 1



Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat.

### Ayat 2

Pemerintah dan Pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

# Pengertian Cadangan Pangan Masyarakat (Menurut UU N0 18 Tahun 2012)

Cadangan Pangan Masyarakat adalah **persediaan pangan** yang **dikuasai dan dikelola** oleh masyarakat di tingkat **pedagang, komunitas, dan rumah tangga.**



# TUJUAN DAN PENTAHAPAN

## Tujuan :

1. Meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan.
2. Meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam pengelolaan cadangan pangan, dan
3. Meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.

## Pentahapan:

1. Tahap **Penumbuhan**: identifikasi lokasi dan pembangunan fisik lumbung.
2. Tahap **Pengembangan**: identifikasi kelompok lumbung pangan dan pengisian cadangan pangan
3. Tahap **Kemandirian**: penguatan kelembagaan kelompok melalui pemberian dana bantuan sosial

# TAHAPAN KEGIATAN LPM

## Tahap Penumbuhan

(Pembangunan fisik lumbung melalui DAK)



## Tahap Pengembangan

(pengisian cadangan pangan melalui Bansos dana dekonsentrasi)  
APBN = 20 juta

## Tahap kemandirian

(penguatan kelembagaan untuk memperoleh nilai tambah melalui Bansos dana dekonsentrasi)  
APBN = 20 juta

# Pengembangan LPM 2009-2016

Terhitung sejak tahun 2009-2016 telah ditumbuhkan Lumbung Pangan Masyarakat sebanyak 3.818. LPM yang sudah mendapat fasilitas pengisian dari Pemerintah 1.746 unit.

Dana pembangunan LPM berasal dari dana APBN (2009) dan DAK Bidang Pertanian (2010-2016)

# Exit Strategi Pasca Kemandirian

Berdasarkan hasil analisis maka dapat direkomendasikan *exit strategi* berikut ini:

- ▶ (1) melakukan pergantian pengurus dengan memperbanyak dari kalangan perempuan;
- ▶ (2) Perluasan peran LPM kearah yang semi bisnis;
- ▶ (3) Pemanfaatan dana desa untuk penguatan permodalan lumbung;
- ▶ (4) Penyatuan lembaga-lembaga permodalan pedesaan bersama-sama LPM.

# Peran Startegis Pemerintah Daerah dalam Upaya Pengembangan LPM Berkelanjutan

- Mengalokasikan anggaran APBD untuk meng-cover kegiatan Pasca Tahap Kemandirian meliputi :
  1. Memberikan pelatihan tentang :
    - ❖ Kewirausahaan
    - ❖ Membangun jaringan kemitraan usaha
    - ❖ Strategi Peminjaman Modal usaha
    - ❖ Pengelolaan cadangan pangan (teknis dan administratif)
  2. Memberikan bantuan dana permodalan usaha kelompok
  3. Studi banding (bila memungkinkan)
  4. Inisiasi kepada kelompok lumbung untuk memiliki badan hukum

# Permasalahan dan Tantangan Pengelolaan CPM

---

- **Kapasitas SDM** kelompok yang **masih kurang** dalam mengelola LPM
- Masih **rendahnya kesadaran** masyarakat/anggota untuk **menyisihkan sebagian hasil panennya** sebagai cadangan
- Administrasi kelompok yang kurang rapi
- **Administrasi hibah penggunaan tanah** untuk dipergunakan kelompok sebagai lahan pembangunan lumbung **belum semuanya dilakukan.**
- **Sebagian kelompok** ada yang **tidak memenuhi standard minimal ketersediaan stock** di lumbung





# KEGIATAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH



# Pengertian Cadangan Pangan Pemerintah

- Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah **persediaan Pangan** yang **dikuasai dan dikelola** oleh pemerintah **provinsi**
- Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah **persediaan Pangan** yang **dikuasai dan dikelola** oleh pemerintah **kabupaten/kota**.
- Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah **persediaan Pangan** yang **dikuasai dan dikelola** oleh pemerintah **desa**

# PENGATURAN CADANGAN PANGAN NASIONAL (CPN)

Berdasarkan UU Pangan

**Pengelolaan CPN**



**untuk antisipasi  
(pasal 24-25)**



- kekurangan ketersediaan pangan,
- gejolak harga pangan,
- keadaan darurat,
- bantuan internasional.

# **PENGATURAN CPN (UU Pangan)**

**Penyaluran CPP**

**untuk  
menanggulangi  
(pasal 31)**

- kekurangan pangan,
- gejolak harga pangan,
- Bencana alam,
- bencana sosial, dan/atau
- menghadapi keadaan darurat.

# Undang-undang RI no 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

## Pasal 12 ayat 2

Ketahanan Pangan merupakan **Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Berdasarkan undang-undang tersebut maka tidak diperlukan lagi SPM tapi harus menyusun NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)

# Perkembangan CPP

- Sebanyak **154** kabupaten/kota telah memanfaatkan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2012;
- sebanyak **97** kabupaten/kota diantaranya telah mengeluarkan **Peraturan Bupati**
- Selain itu, terdapat **30 kabupaten/kota** yang mengelola cadangan pangan pemerintah melalui **kerja sama** dengan pihak ketiga seperti **Bulog, Swasta, Gapoktan, dan lain-lain.**

# UPAYA PEMERINTAH PUSAT (APBN)

- A. Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian 2012 dan 2015, untuk mendukung pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah, Kementerian Pertanian melalui Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2012 dan 2015 salah satu diarahkan pemanfaatannya untuk penyediaan gudang cadangan pangan pemerintah.
  
- B. Melakukan apresiasi/pelatihan bagi pengelola cadangan pangan pemerintah daerah sejak pada tahun 2013 sampai sekarang kerjasama dengan Bulog.

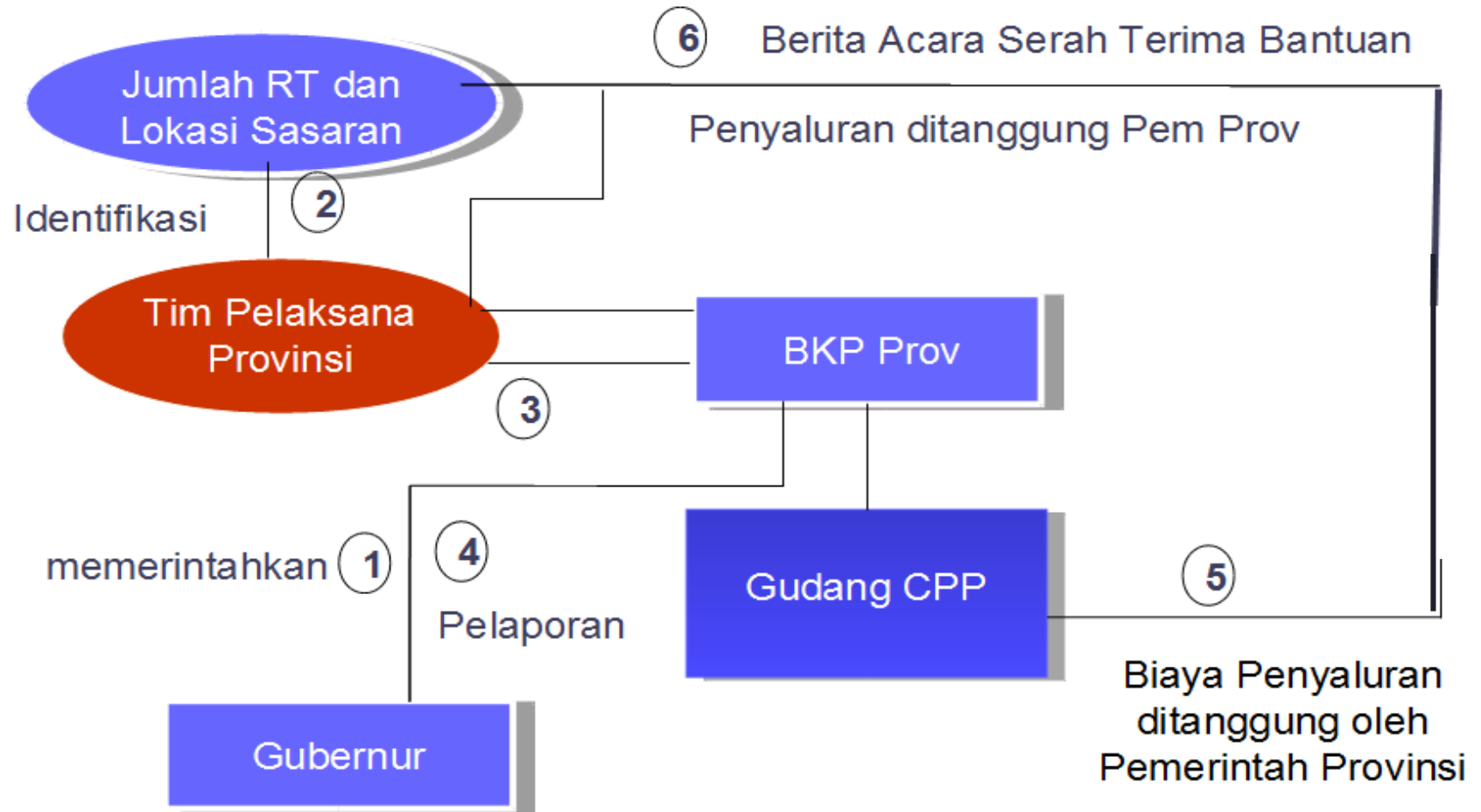
# UPAYA PEMERINTAH DAERAH (APBD)

- A. Melakukan pengisian terhadap gudang CPP yang telah dibangun dari dana DAK 2012 dan 2015.
- B. Memberikan insentif terhadap tenaga pengelola gudang CPP.



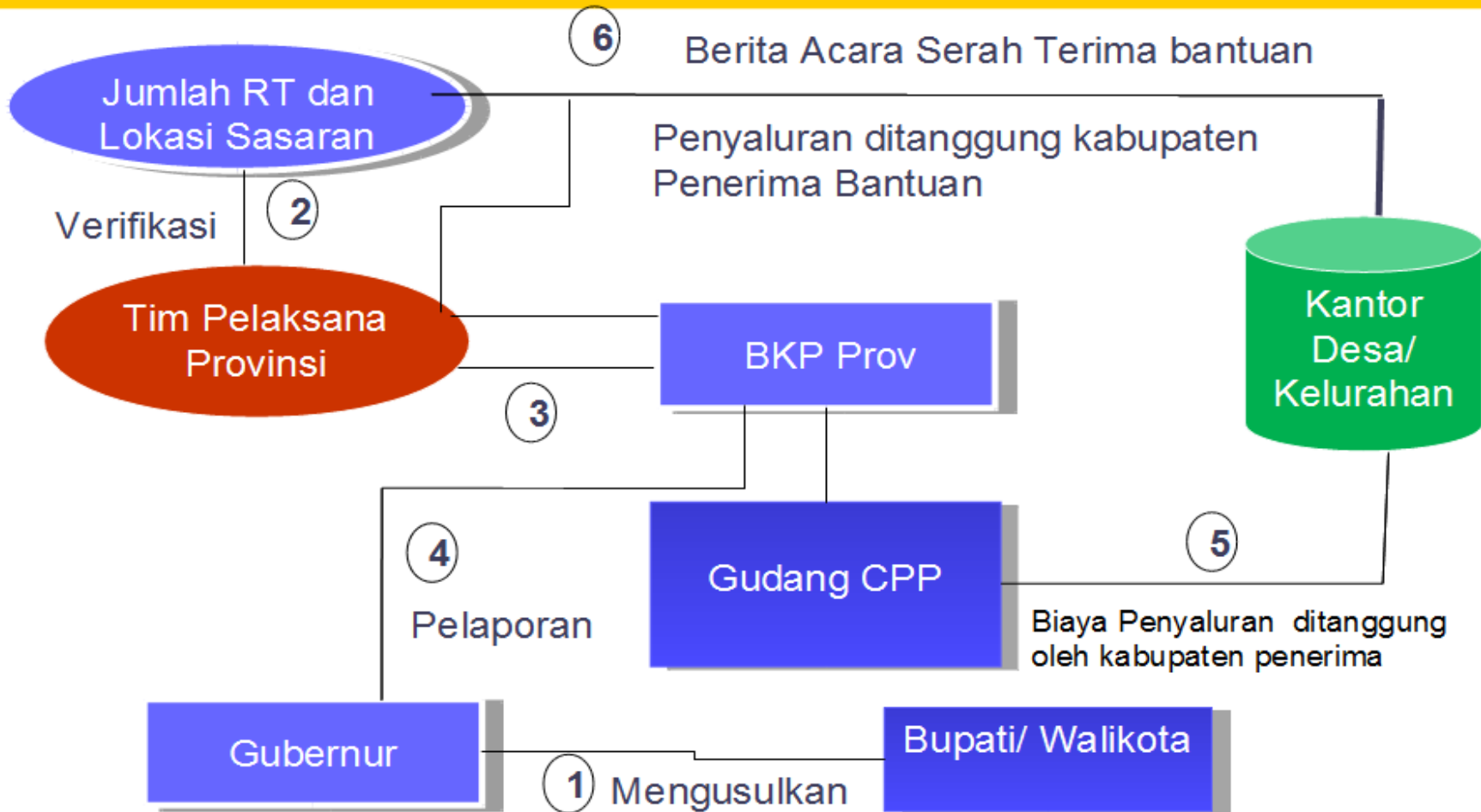
# MEKANISME PENYALURAN TINGKAT PROVINSI

## MEKANISME PENYALURAN (TOP DOWN)



Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 276,33 g/hari paling lama 60 (enam puluh) hari

# MEKANISME PENYALURAN (BOTTOM UP)



Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 276,33 g/hari paling lama 60 (enam puluh) hari

# PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

## Pasal 8 :

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah baik jumlah maupun mutunya antardaerah dan antar waktu.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah.

Pasal 8 :

- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengolahan, dan hibah.
- (4) Ketentuan mengenai batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah.

# Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

## Pasal 17 :

- (1) Bupati/Walikota menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  
- (2) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok dengan mempertimbangkan :
  - a. Produksi pangan pokok tertentu di wilayah kabupaten/kota.
  - b. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat.
  - c. Kerawanan pangan di wilayah kabupaten/kota.

## Perhitungan Jumlah CPP Kab/Kota dan Provinsi

Maka jumlah kebutuhan cadangan pangan tidak mengikuti SPM tetapi dihitung dengan menggunakan asumsi dibawah ini :

- ✓ **Kebutuhan Konsumsi Total**  
= jumlah penduduk x konsumsi/kapita/tahun
- ✓ **Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi**  
= 2 x Jumlah penduduk kab.kota terbanyak (satuan ton)
- ✓ **Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten**  
= (0,5 x jumlah penduduk x kebutuhan perkapita): 1.000  
(dlm ton)

Formula ini pernah digunakan sebagai indikator cadangan pangan dalam penyusunan kelembagaan Ketahanan Pangan

## **Contoh Perhitungan :**

❖ Di Provinsi Jawa Barat diketahui Kab. Bogor memiliki jumlah penduduk kabupaten/kota terbanyak sekitar 5.300.000 jiwa.

❖ **Jumlah Cadangan Pangan Kab Bogor** adalah  
(0,5 x 124 kg/kap x 5.300.000) : 1000 = 328,6 ribu ton.

**Jumlah Cadangan Pangan Provinsi Jawa Barat**

2 x 328,6 ributon = 657,2 ribu ton

# CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

## 1. BAGI YANG SUDAH ADA GUDANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH

- Pengisian beras di gudang diperoleh dari membeli gabah/beras dari Gapoktan atau kelompok lain, harga sesuai dengan HPP atau sesuai PP No 17 tahun 2015

## 2. BAGI YANG BELUM PUNYA GUDANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH

Bekerjasama dengan BULOG. Harga sesuai dengan MoU berdasarkan PMK. Bila terjadi perubahan PMK, maka konsekuensinya pengurangan jumlah beras atau disepakati ada peningkatan biaya kontrak

- Sampai saat ini belum ada implementasinya





# Permasalahan dan Tantangan Pengelolaan CPP

---

- **Belum semua daerah mengalokasikan dana APBD untuk pengadaan stock CPPD**
- **Minimnya jumlah dan kapasitas SDM yang mampu dalam mengelola CPPD**
- **Gudang CPPD yang dibangun dengan dana DAK di Kab/Kota, jumlahnya baru sekitar 30% dari total Kab/Kota di Indonesia**

# Kegiatan Fungsional AKP Bidang Cadangan Pangan

- **Madya**
  - a. Identifikasi dan menginventaris data dengan tingkat kesulitan kompleks
  - b. Melakukan kajian cadangan pangan masyarakat dan pemerintah
- **Muda**
  - a. Identifikasi dan menginventaris data dengan tingkat kesulitan sederhana
  - b. Mengolah dan menganalisis data/informasi cadangan pangan masyarakat dan pemerintah
- **Pertama**
  - a. Menginventaris data dengan tingkat kesulitan sederhana
  - b. Mengumpulkan data/informasi cadangan pangan masyarakat dan pemerintah

# terima kasih

